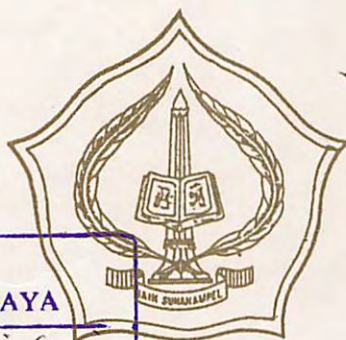


**PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI KECAMATAN  
SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat  
ujian akhir program sarjana strata satu  
guna memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam  
pada Fakultas Syari'ah Surabaya  
IAIN Sunan Ampel



*Sf*

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-1995 047 MJ	No. REG S/1995/MJ/MJ ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh <b>SUSI FAIZAH</b> NRP. 019100111

H. Islan - Kepala desa

**Dosen Pembimbing  
DRS. M. RIDLWAN NASIR, MA.**

**Jurusan Mu'amalah Jinayah  
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
1995**

Hal : Persetujuan Munaqasyah Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya  
IAIN Sunan Ampel.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

N a m a : SUSI FAIZAH  
Nrp. : 019100111  
Jurusan : Muamalah Jinayah  
Judul : Pelaksanaan Pemilihan Kepala  
Desa di Kecamatan Sukodono  
Kabupaten Sidoarjo Ditinjau  
dari Hukum Islam

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut mengharap agar segera di munaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. M. Ridlwan Nasir, MA





NOTA PEMBIMBING

---

Surabaya, 10 Agustus 1995

H a l : Perbaikan  
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Surabaya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami baca dan kami teliti kembali  
naskah skripsi saudara :

N a m a : SUSI FAIZAH  
Nrp. : 0919100111  
Jurusan : Mu'amalah Jinayah  
J u d u l : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di  
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo  
Ditinjau Dari Hukum Islam

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai  
dengan keputusan Sidang Munaqasah yang dilaksanakan  
pada tanggal 07 Agustus 1995. Dengan Demikian kami  
harap agar dapat disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima  
kasih.

Wassalami'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Drs. M. Ridlwan Nasir, MA

---

NIP. 150 203 748

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
"SUNAN AMPEL"  
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Ujian Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada :

H a r i : Senin  
Tanggal : 07 Agustus 1995

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir Program Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

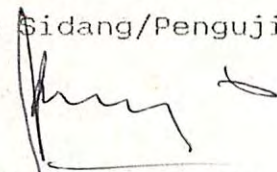
Maka dengan ini kami sahkan hasil Sidang Ujian Munaqasah diatas.



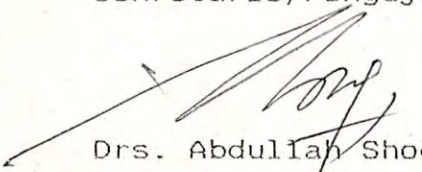
Surabaya, Agustus 1995  
Dekan,  
Drs. H. Kuslan, MA  
NIP. 150 015 043

Sidang Ujian Munaqasah

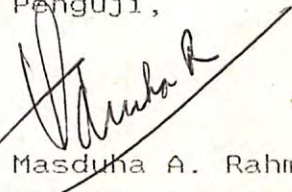
Ketua Sidang/Penguji,

  
Drs. H. Asj'ari Ahm  
NIP. 150 102 233

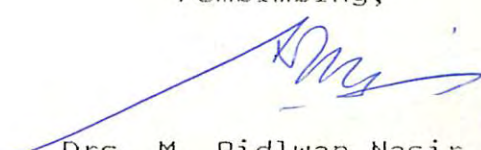
Sekretaris/Penguji,

  
Drs. Abdullah Shodiq  
NIP. 150 252 755

Penguji,

  
Drs. ~~X~~ Masduha A. Rahman  
NIP. 150 017 075

Pembimbing,

  
Drs. M. Ridlwan Nasir, MA  
NIP. 150 203 748







## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
M O T T O	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

## BAB I : P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah .....	4
D. Perumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Studi .....	6
F. Kegunaan Studi .....	6
G. Pelaksanaan Penelitian .....	7
1. Lokasi Penelitian .....	7
2. Subyek Penelitian .....	8
3. Data yang berhasil dihimpun .....	8
H. Sumber Data .....	9
I. Tehnik Penggalian Data .....	10
J. Methode Analisis Data .....	11

## BAB II : LANDASAN TEORI

A. KETENTUAN UMUM .....	13
1. Pengertian Desa dan Kepala Desa .....	13
2. Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa .....	16







### A. Persiapan Menjelang Pemilihan

## B. Mobilisasi Massa/Pencarian

C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... 63

## A. Kesimpulan ..... 66

B. Saran-saran .....	67
----------------------	----

## L A M P I R A N



B A B I

P E N D A H U L U A N

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah kepemimpinan (leadership) adalah merupakan masalah yang sudah kuno, namun tetap up to date. Karena dari zaman ke zaman masalah tersebut tetap menarik untuk dijadikan sebagai topik pembahasan.

Hal ini disebabkan adanya kepemimpinan itu sangat dibutuhkan manusia sepanjang masa, dimana manusia atau sekelompok manusia selalu mendambakan untuk dapat hidup aman, tentram dan sejahtera lahir maupun batin. Untuk memperoleh itu semua diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat mengatur, mengayomi dan bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan kehidupan bersama/bermasyarakat. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita tentang perlunya kepemimpinan dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, sebagaimana diisyaratkan dalam hadist beliau sebagai berikut :

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤموا أحدهم (رواه أبو داود)

Artinya : "Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantaranya menjadi kepala rombongan" (Abu Dawud, III:36).



Karena setiap manusia sudah dipatok oleh Rasulullah menjadi pimpinan, minimal menjadi pemimpin diri sendiri, rumah tangga atau lebih jauh lagi menjadi pemimpin masyarakat, maka seorang pemimpin harus menyiapkan diri menjadi pemimpin yang berkualitas, bertanggungjawab dan efektif. Sebab kepemimpinan itu menuntut tanggungjawab yang tidak ringan, yaitu disamping tanggungjawab atas dirinya, orang-orang yang dipimpinnya, juga bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah :

كلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ قال امام الذی  
 علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ (رواه البخاری وحکم)

Artinya: "Kamu semua adalah pemimpin, dan kamu akan dimin  
tai pertanggungjawab atas kepemimpinannya, seor  
ang pemimpin adalah penanggungjawab, dan dia  
dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpin  
nya" (Bukhari, IV:233).

Dari anggapan dasar yang dikemukakan diatas terdapat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagai manifestasi kehidupan Demokrasi Pancasila secara langsung karena rakyat memilih secara langsung. Tidak lewat lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana memilih Kepala Daerah Tingkat II atau Kepala Daerah Tingkat I, maka diharapkan tanggungjawab yang tinggi dari aparat pemerintah Daerah Tingkat II maupun Tripida Kecamatan untuk menjaga kelestarian Demokrasi Pancasila di desa khususnya dalam pemilihan Kepala Desa (Sudirwo, 1991:52).









nanya masih memerlukan pembatasan. Studi ini membatasi diri dari :

- Segi Subyek : Para Calon Kepala Desa
- Segi Aktifitas : Pencarian pendukung dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- Segi Tempat : Dua desa di wilayah Kecamatan Sukodono, yaitu Desa Jogosatru dan Desa Jumputrejo.
- Segi Waktu : Selama tahun 1994 dan 1995



- ## E. TUJUAN STUDI

a). Mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1994 dan tahun 1995.

- ## F. KEGUNAAN STUDI

[illegible]

- a). Dapat menjadi salah satu bacaan untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- b). Dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi warga masyarakat apabila ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- c). Dapat dijadikan landasan pemahaman bagi kehidupan beragama, khususnya dalam hal pengangkatan seorang pemimpin.

## G. PELAKSANAAN PENELITIAN

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sukodono yaitu salah satu Kecamatan yang cukup luas yang terdiri dari beberapa desa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan :

- a). Para pihak yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa nampak sebagian besar penduduk asli Kecamatan Sukodono, sehingga sikap dan tindakan mereka sepanjang yang menyangkut pemilihan Kepala Desa dapat



b). Suasana kawasan Kecamatan ini nampak tertib sehingga pelaksanaan penggalan data dapat berjalan lancar.

Dalam penelitian ini yang diperlukan sebagai subyek penelitian adalah para calon Kepala Desa yang beragama Islam, termasuk juga pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan kegiatan tersebut. Kaitannya dengan teknik wawancara (salah satu tehnik penggalian data yang diperlukan), mereka semuanya merupakan responden.

Berdasarkan perumusan masalah seperti telah dikemukakan di atas, maka data-data yang berhasil dihimpun meliputi :

- Data tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- Data tentang para calon Kepala Desa.
- Data tentang proses pencalonan Kepala Desa.
- Data tentang persyaratan yang harus dipenuhi bagi para calon Kepala Desa.

1. Para calon Kepala Desa.
2. Bagian adminitrasi Kecamatan.
3. Pejabat sementara (Pjs) yang menggantikan kedudukan Kepala Desa dari dua desa yang mengadakan pemilihan.
4. Bagian Pemerintahan Desa di Kecamatan.
5. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih.

1. Undang-Undang No.05 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Saparin Sumber, Dra, Tata Pemerintahan Desa dan Administrasi Pemerintahan desa, Galia Indonesia, Jakarta 1986.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.



5. Sudirwo Daeng, Drs, Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan di Desa, Angkasa, Bandung, Tahun 1991.
6. Pulungan, J, Suyuthi, Dr, MA, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, Tahun 1994.
7. Ahmad Mumtaz, Teori Politik Islam, Mizan Bandung, 1994.
8. Abidin Ahmad Zaenal, H, Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al Ghozali, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

## I. TEKNIK PENGALIAN DATA

Teknik penggalan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a). Observasi (pengamatan langsung)

Penggunaan tehknik penggalian data melalui observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek di lapangan yang akan diteliti yaitu peristiwa-peristiwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

c). Studi Dokumen

## J. METHODE ANALISIS DATA

a. Editing : Pengolahan data guna memperoleh kejelasan.

[illegible]









- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 pada pasal 1 huruf a tentang Pembentukan Dusun dan Lingkungan Dalam Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 pasal 1 huruf a) tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4b Tahun 1983 pasal 1 huruf a) tentang Pejabat yang mewakili Kepala Desa/Kelurahan dalam hal Kepala Desa/Kepala Kelurahan berhalangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 pasal 1 huruf a tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 pasal 1 huruf a tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 pasal 1 huruf a tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 pasal 1 huruf a tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 pasal 1 huruf a tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa. (Armas, 1991 : 62-657)

Sesuai dengan pembatasan yang diberikan oleh peraturan maka yang dimaksud dengan desa atau daerah yang setingkat menurut Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa No. 19 Tahun 1965 adalah suatu wilayah setempat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Buku I bab IV REPELITA (1968), Desa diartikan sebagai daerah administrasi terkecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Saparin, 1986:28). Adapun pengertian Kepala Desa adalah pimpinan yang berwenang dalam desa (Saparin, 1986:28).

Pengertian pimpinan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan pada pasal 1 huruf d adalah :

"Seorang yang dipercaya untuk melakukan hak, wewenang dan kewajiban sepenuhnya/memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat desa/Kelurahan".



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1983 tentang serah terima jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam pasal 1 huruf a bahwa yang dimaksud dengan :

"Kepala Desa adalah Kepala Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 06 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa".

Dalam Istilah adat Kepala Desa disebut Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah); Mandor, Lembut, Kekolot (Jawa Barat, Banten); Kejuron, Penghulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh); Penghulu Andiko (Sumatera Barat); Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan); Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon); Raja penusunan (Sekitar Danau Toba); Kasair Penghulu (Karo Batak); Parek, Klian (Bali); Marsaoleh (Gorontalo); Komelaho (Kalimantan Selatan). (Saparin, 1986:30)

2. Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa menurut Undang-Undang Pokok-pokok Pemerintahan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 pasal 4 adalah Penduduk Desa Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;

- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti;
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera Desa yang berada di luar Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan.
- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Adapun syarat-syarat dapat dipilih menjadi Kepala Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala desa pada pasal 7 adalah syarat pertama sebagaimana menurut UU. No.05 Tahun 1979 huruf a s/d j. Sedangkan syarat selanjutnya adalah :

- k. Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf g juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
1. Bagi Pegawai Negeri putra Desa yang terpilih diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

### 3. Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Kepala Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan (Pasal 2) antara lain :

Pasal 2 :

"Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan Desa berhak dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang





2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
3. Melakukan pungutan terhadap masyarakat Desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat di desanya;
6. Menetapkan keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Desa dan Kebijakan pimpinan pemerintahan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban Kepala Desa

1. Melaksanakan tata tertib administrasi pemerintahan di tingkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat;

3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa;
4. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
5. Bertanggungjawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan;
6. Melaksanakan Keputusan-keputusan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyusun rencana Program Kerja Tahunan dan Program Kerja Lima Tahunan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyusun rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
10. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa. (Armas, 1991:200)

Pasal 4 :

"Dalam melakukan tugas dan kewajibannya Kepala Desa sebagai penanggungjawab utama dibidang pembangunan dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa".



## Pasal 5 :

"Kepala Desa sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan pemerintahan Umum mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

## a. Hak Kepala Desa :

- 1) Melaksanakan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 3) Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## b. Wewenang Kepala Desa :

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya;
- 2) Pembinaan idiologi Negara, politik dalam negeri dan Kesatuan bangsa di wilayah Desanya;
- 3) Pembinaan tertib pemerintahannya di wilayah Desanya;
- 4) Pembinaan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi fungsional Desa.

## c. Kewajiban Kepala Desa :

- 1) Memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya;

- 2) Memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan yang ada di wilayahnya;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### 4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa mempunyai tugas :
  - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
  - b. Menjalankan urusan pemerintahan, pemabangunan baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan pembangunan Desa.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri;

- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya;
- c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa;
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan urusan rumah tangga Desanya sendiri. (Armas, 1991:65)

## 5. Pemberhentian Kepala Desa

Menurut pasal 9 Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :

- a) meninggal dunia;
- b) atas permintaan sendiri;
- c) berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- d) tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang ini (persyaratan dapat dipilih menjadi Kepala Desa);
- e) melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 8



ayat 2 Undang-undang ini (sumpah jabatan);

- f) melanggar larangan yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang ini;
- g) sebab-sebab lain.

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa setempat (Penjelasan pasal 9).

Dalam pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentia Kepala Desa disebutkan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
  - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 (Persyaratan dapat dipilih menjadi Kepala Desa);
  - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberhen tikan atas usul Camat setelah diadakan penelitian oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II secara seksama.

## 1. Pengertian Pemimpin

hadist Rasulullah SAW. :  
كَلِمَ رَاعٍ وَكَلِمَ مَسْئُورٍ عِزِّيَّةٌ (رواه البخاري ومسلم)

Secara eksplisit dalam hadist di atas, Rasulullah mengualifisir bahwa setiap muslim adalah pemimpin dalam arti formal dan non-formal. Dalam arti formal yang dimaksud

pemimpin adalah orang yang menduduki suatu jabatan dalam struktur pemerintahan. Sedang dalam arti non-formal adalah orang yang menjadi pimpinan, baik sebagai kepala rumah tangga (seorang ayah atau suami) maupun sebagai pimpinan masyarakat (suatu kelompok atau sejumlah orang yang merupakan suatu kumpulan yang tidak resmi). (Ashhary, 1992:81)

Dari hadist tersebut, maka jelaslah bahwa semua orang yang beriman adalah kholifah atau wakil Allah. Jabatan kholifah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah universal, popular vicegerency. Tidak hanya didominasi oleh seseorang, keluarga atau kelompok tertentu, akan tetapi setiap mukmin adalah kholifah Allah. Dan masing-masing bertanggungjawab di hadapan Tuhannya sesuai dengan kedudukannya. (Hamidullah, 1987:44)

Adapun pengertian pemimpin adalah :

1. Menurut arti bahasa :

Pemimpin berasal dari kata pimpin, pemimpin berarti orang yang memimpin. (Departemen P & K, 1990:684)

2. Menurut arti istilah :

Pemimpin adalah petugas yang bersedia bekerja demi tujuan dan cita-cita bersama dengan berusaha mencapai tujuan dan cita-cita bersama tersebut melalui organisasi yang teratur. (Mangunhardjana, 1990:13)







2) Surat Asy-Syu'araa ayat 150-152 :

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ كُنْتُمْ حُرُومًا ۖ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ مِنْ ذِكْرِهِمْ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ ۝  
الَّذِينَ يَخْسَدُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يُعْمِلُونَ ۝

Artinya : "Maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan". (Depag RI, 1989:584)

3) Surat Al-Baqarah ayat 124 :

وإذا استأجر ابراهيم ربه بكلمت خاتمه قل ان جاءك  
للساس اماما قل ومن ذريتي قل لا ينال عهد الظالمين ٥

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman : "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata "Dan saya mohon juga dari keturunanku". Allah berfirman : "Janji-Ku ini tidak menge-nai orang-orang yang dzalim".  
(Depag RI, 1989:32)

b. Al-Hadist

لَا إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ وَفَرَّقُوا مَرَّةً أَحَدَهُمْ (رواه ابو داود)

Artinya : "Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantaranya menjadi kepala rombongan" (Abu Dawud, III:36)

c. Peristiwa Pengangkatan Kholifah di zaman Khulafaur Rasyidin.











e. Menurut Al Ghazali :

1. Beragama Islam;
  2. Mampu bertindak;
  3. Mempunyai kewibawaan (kifayah);
  4. Jujur dalam keuangan (wara'):
  5. Mempunyai ilmu pengetahuan (baik yang dimilikinya sendiri ataupun dengan meminta nasehatnya para ahli)
- (Abidin, 1975:294)

f. Menurut Jumhur Ulama' :

Menurut Jumhur Ulama' bahwa orang yang berhak memegang jabatan imamah adalah orang yang mampu berijtihad supaya dapat menegakkan kepentingan agama, punya wawasan supaya dapat menegakkan kepentingan kekuasaan, seorang pemberani supaya mampu membela hak.

Adapun syarat utama menurut ijma' Ulama' tentang sifat yang harus dimiliki oleh seorang imam adalah harus adil agar tidak menimbulkan kedlaliman, harus berakal supaya mampu melaksanakan tugas, harus baligh karena anak kecil lemah akalnya, harus laki-laki karena wanita akal dan agamanya kurang, harus orang merdeka supaya tidak habis waktunya dengan pekerjaan majikannya dan supaya tidak durhaka kepada majikannya (Musa, 1991:66-67).

Jadi syarat-syarat yang harus dimiliki (kualifikasi) dalam posisi kepemimpinan adalah muslim, yang memiliki keistimewaan mental dan kemampuan jasmaniyah serta derajat rohaniyah. Keistimewaan ini hanya berkaitan dengan kualitas dan ciri-ciri. Namun jika tindakannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan As Sunnah atau kemampuan jasmaniyah serta mentalnya lemah maka tidak dapat dipertahankan dalam posisi kepemimpinan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai administrator. Akibatnya setiap muslim tidak diwajibkan taat dan mengikutinya (Buraey, 1986:375).

#### 4. Cara Pengangkatan Pemimpin

Pemilihan imam (pemimpin) dipandang oleh Fakih sebagai kewajiban sosial atau bersama (fardlu kifayah), seperti bertanggungjawab mempelajari ilmu pengetahuan, mengajar atau menjadi hakim. Al Mawardi menunjukkan bahwa para pemilih imam harus memiliki pengetahuan tentang syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatan itu dan kearifan yang membuat mereka dapat memilih orang yang paling mampu untuk suatu jabatan (Ahmad, 1994:84).

Ditinjau dari perspektif Islam, maka kepemimpinan dipandang sebagai kewajiban kelompok. Oleh sebab itu Islam memandang masalah kepemimpinan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi kelompok, sebagaimana sebuah organisasi juga harus memiliki tujuan dan sasaran. Selanjutnya posisi kepemim

pinan di dalam kelompok bukan saja akan memperkuat kegiatan para anggota, tetapi juga akan memenuhi dan menjamin keperluan pribadi dan kelompok yang ada dalam organisasi. (Buraey, 1986:377)

Pemimpin adalah untuk kepentingan rakyat, dan untuk menjaga kepentingan rakyat, maka hendaklah rakyat pula yang berhak untuk memilih. Bukan orang yang mencapai jabatan pimpinan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, misalnya memberikan sesuatu kepada seseorang atau banyak orang agar dirinya dapat dipilih menjadi pimpinan, karena pada hakekatnya hal tersebut sama dengan suap menyuap. Sebagaimana peringatan Rasulullah dalam hadits :

لوزة الله على الراشي والمرتش

Artinya : "Bahwa Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap". (Majjah, II:775)

Pemilihan harus berdasarkan keinginan yang tidak dipaksa atau dipermainkan dengan harta atau kekuasaan. Dalam Islam sendiri memandang gagasan kepemimpinan dalam bentuk yang positif, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bukan diinginkan (secara pribadi), melainkan diperlukan oleh tatanan sosial manapun. Al Qur'an (4:59, 18:28, 22:41) telah menggambarkan definisi dan makna kepemimpinan di dalam Islam. Kepemimpinan adalah kewenangan yang dilaksanakan oleh pribadi yang amat dekat dengan



وَشَاوَرَهُمُ بِالْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ٥

Dengan mengkaji peristiwa pengangkatan kholifah pada hulaufaur-Rasyidin, Abu Bakar telah diangkat melalui an dalam suatu musyawarah terbuka. Umar bin Khatab at melalui penunjukkan oleh pendahulunya dan tidak pemilihan dalam pertemuan terbuka. Setelah Abu pribadi memutuskan bahwa Umarlah yang paling tepat menggantikannya, maka diadakan musyawarah secara up yang diikuti oleh beberapa sahabat senior. Utsman ffan diangkat melalui pemilihan dalam satu pertemuan

terbuka oleh "Dewan Formatur" yang terdiri dari enam orang yang ditunjuk oleh pendahulunya, dan penunjukannya tidak berdasarkan unsur perwakilan tetapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi masing-masing yakni karena mereka menurut Nabi adalah calon-calon penghuni surga. Ali bin Abi Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, tetapi dalam suasana kacau dan hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah. Oleh karena keabsahan pengangkatan Ali, maka ditolak oleh sebagian masyarakat termasuk Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Gubernur Suria (Sjadzali, 1990:30).

Dengan demikian pada dasarnya cara pengangkatan kholifah semasa Khulafaur-Rasyidin adalah dipilih melalui jalan musyawarah. Inilah yang diakui sebagai konvensi di zaman kekholifahan mengenai penunjukkan serta pemilihan Kepala Negara Islam. Dan ini merupakan rangkuman dari tindakan kolektif para sahabat yang sangat penting sebagian besar didasarkan pada diamnya Rasul untuk menunjuk pengganti beliau dan perintah Al Qur'an bahwa semua keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak haruslah diambil secara musyawarah. (Maududi a, 1994:258)









(Sumber data : Kantor Kepala Desa Jogosatru)

Melihat tabel di atas, maka nampaknya mayoritas penduduk Desa Jogostu adalah Karyawan yaitu 1.501 Orang (50.28 %). Hal ini bisa dimaklumi karena daerah di Kecamatan Sukodono adalah termasuk daerah industri yaitu dengan banyaknya telah didirikan pabrik-pabrik. Dengan berdirinya pabrik-pabrik ini dapat membantu pencaharian penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya dapat dilihat bahwa Desa Jogosatu telah memiliki taraf kehidupan yang lebih baik, karena disamping bertani, wiraswasta (berdagang) juga sebagai Karyawan Perusahaan.

Demikian juga dengan pencaharian penduduk Desa Jumputrejo, juga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik, karena disamping bertani penduduk Desa Jumputrejo juga sebagai Karyawan perusahaan. Hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Sidoarjo termasuk juga wilayah Kecamatan Sukodono telah banyak berdiri pabrik-pabrik/industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

TABEL II  
KEADAAN PENCAHARIAN PENDUDUK  
DESA JUMPUTREJO

No.	Jenis Usaha/Pekerjaan	Jumlah	Prosen
1.	Karyawan	367 Orang	32.16 %
2.	Wiraswasta	324 Orang	28.40 %
3.	T a n i	288 Orang	25.24 %
4.	Pertukangan	22 Orang	1.93 %
5.	Buruh Tani	127 Orang	11.13 %
6.	Pensiunan	13 Orang	1.14 %
	J u m l a h :	1141 Orang	100 %

(Sumber data : Kantor Kepala Desa Jumptrejo)

### 3. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam bidang pendidikan nampaknya Desa Jogosatru dan Desa Jumputrejo sudah mengalami kemajuan dan masyarakatnya telah sadar arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah sarana pendidikan

yang ada di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III

SARANA PENDIDIKAN DI DESA JOGOSATRU

No.	Nama Sekolah	Jumlah	Banyak Murid		
			L	P	Jumlah
1.	TK DHARMA WANITA	1	29	24	53
2.	SDN JOGOSATRU I	1	27	31	58
3.	SDN JOGOSATRU II	1	32	25	57
4.	M. IBTIDAIYAH	1	85	74	159

(Sumber data : Kantor Kepala Sekolah masing-masing Sekolah)

TABEL IV

SARANA PENDIDIKAN DI DESA JUMPUTREJO

No.	Nama Sekolah	Jumlah	Banyak Murid		
			L	P	Jumlah
1.	TK DHARMA WANITA	1	35	29	64
2.	SDN JUMPUTREJO I	1	140	145	285
3.	SDN JUMPUTREJO II	1	116	101	117
4.	TK MUSLIMAT	1	41	34	75
5.	M. IBTIDAIYAH	1	75	39	86

(Sumber data : Kantor Kepala Sekolah masing-masing Sekolah)



#### 4. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk yang berada di kedua Desa tersebut mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemeluknya yang mencapai :

a. Desa Jogosatru :

- ```

- Islam      : 1921 Orang
- Kristen   : -
- Budha     : -

```

b. Desa Jumputrejo :

- Islam : 3764 Orang
- Kristen : 25 Orang
- Budha : 1 Orang

Dari keadaan sosial keagamaan tersebut, Desa Jogosa-  
tru keseluruhan warganya adalah beragama Islam. Sedangkan  
Desa Jumputrejo meskipun ada yang beragama Kristen dan  
Budha, namun mereka kurang aktif dalam menjalankan ibadah-  
nya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya tempat-  
tempat ibadah bagi mereka, sehingga keberadaan mereka tidak  
terlihat dalam masyarakat.

Berbeda dengan yang beragama Islam, dalam praktek kehidupan sehari-hari, mereka dalam menjalankan ajaran serta ibadahnya sangat khusuk dan taat. Bahkan juga dalam setiap satu/dua minggu sekali, mereka mengadakan acara pengajian untuk mendapat siraman rohani dari seorang ustadz atau

Untuk meningkatkan iman dan ibadahnya, penduduk yang beragama Islam mempunyai beberapa sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut :

- Masjid : 4 buah
- Musholla/Langgar : 11 buah

- Masjid : 4 buah
- Musholla/Langgar : 15 buah

(Sumber data : Kantor Kepala Desa Jogosatru dan Desa  
Jumputrejo)

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Jogosatru dan Desa Jumptrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Sejak diberlakukannya UU No.05 Tahun 1979 di seluruh desa di Indonesia khususnya di Jawa, maka masa jabatan Kepala Desa hanya berlangsung selama 8 (delapan) tahun, bukan lagi bersifat turun temurun dan seumur hidup seperti pada saat sebelum adanya undang-undang yang mengaturnya.

Di Jawa Timur khususnya UU No.05 Tahun 1979 diperuntukkan bagi pemilih Kepala Desa yang Kepala Desanya telah menjabat minimal delapan tahun, demikian juga di Desa Jogosatru dan Desa Jumptrejo adalah dua desa diantara sembilan belas desa di Kecamatan Sukodono yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Pada saat masyarakat mengetahui masa akan berakhirnya suatu jabatan Kepala Desa di kedua desa tersebut, masyarakat mulai membicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin mereka pada masa yang akan datang. Dengan penuh harapan terhadap kepemimpinan Kepala Desa yang tentunya sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakatnya. Pembicaraan tersebut tidak lepas dari siapa yang berambisi untuk mencalonkan dirinya dan motivasi apa yang mendorongnya sehingga mereka mencalonkan sebagai Kepala Desa.

Sementara masyarakat sibuk dengan pembicaraan tersebut, maka dibentuklah panitia pendaftaran Calon Kepala Desa (yaitu Desa Jogosatru dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 1994 dan Desa Jumptrejo pada tanggal 28 September 1994). Dan sebagai ketua panitia adalah sekretaris desa selaku Pjs Kepala Desa dari dua desa tersebut.

1. Drs. Imam, Umur 42 Tahun, pendidikan Sarjana.
2. Subakri, Umur 48 Tahun, pendidikan SMA.
3. Asmadi, Umur 38 Tahun, pendidikan SMA.
4. Mat Ridwan, Umur 42 Tahun, pendidikan SMP.

1. Robiyanto, Umur 38 Tahun, pendidikan SMA.
2. Ir. Soenyoto, Umur 32 Tahun, pendidikan Sarjana.
3. Sri Handayani, Umur 35 Tahun, pendidikan SMA.

a. Desa Jogosatru bakal calon Kepala Desanya adalah :

1. Drs. Imam
2. Asmadi

- Tahap berikutnya setelah adanya pendaftaran tersebut maka bakal calon Kepala Desa mengalami bersih diri dan bersih lingkungan (Litsus), untuk Desa Jogosatru tanggal 9 Mei 1994 dan Desa Jumputrejo tanggal 5 Januari 1995.

## 2. Mobilisasi Massa/Pencarian Pendukung

[illegible]



Dilihat dari gejala ini, maka calon Kepala Desa tersebut merupakan jajaran orang kaya di desanya, karena untuk mewujudkan cita-citanya memerlukan pengorbanan yang cukup banyak diantaranya berupa materi. Mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan biaya yang banyak. Karena selain pada jabatan Kepala Desa tersebut sudah melekat yang merupakan simbol kekayaan dan status sosial, maka pemilihan Kepala Desa juga melibatkan semua warga desa yang mempunyai hak pilih. Simbol kekayaan dan status sosial pada jabatan Kepala Desa tersebut sudah melekat hampir semua Kepala Desa di Kecamatan Sukodono. Disamping itu Kepala Desa merupakan pimpinan formal yang sangat berpengaruh, baik dalam kehidupan ketataprajaan maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu Kepala Desa mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat pedesaan.

Desa, merupakan benteng demokrasi Pancasila yang terakhir terutama dapat tercermin dalam pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan ini dapat dilihat adanya pelaksanaan demokrasi secara langsung karena rakyat dalam memilih Kepala Desanya secara langsung tidak diwakilkan juga tidak melalui lembaga perwakilan. Dan dalam pengambilan keputusan serta pemilihan ditentukan dari hasil suara terbanyak. Maka faktor utama yang menentukan kemenangan seorang calon dalam pemilihan ini adalah jumlah suara terbanyak yang diperolehnya. Dan untuk memperoleh suara tersebut tentunya

seorang calon akan berusaha semaksimal mungkin dengan menempuh berbagai cara. Diantaranya yaitu dengan melakukan mobilisasi massa atau pencarian pendukung. Untuk memperoleh pendukung yang banyak nampaknya calon-calon tersebut tidak terlibat secara langsung, namun dalam upaya tersebut mereka memerlukan bantuan orang lain. Hal demikian dapat dimaklumi karena warga masyarakat di kedua desa yang mengadakan pemilihan tersebut banyak sekali yang memiliki hak suara atau hak pilih. (Hasil wawancara dengan bapak Musman, bapak Suprpto dan bapak Sukardi)

Dalam kaitannya mobilisasi massa atau pencarian pendukung, seorang calon memerlukan kader (orang yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan, membina dan mengawasi massa yang mendukung) dan pendukung utama dari para tokoh masyarakat desa yang disegani dan berpengaruh dalam masyarakat sehingga mempunyai massa tersendiri. Peranan kedua pendukung ini bagi seorang calon adalah sangat menentukan bagi keberhasilannya dalam mencari pendukung massa sebanyak-banyaknya sebagai upaya memenangkan pemilihan Kepala Desa. Dalam penentuan kader, calon memilih orang-orang yang dapat dipercaya dan supel terhadap masyarakat, karena akan menentukan jumlah simpatisan masyarakat untuk memilihnya.

Pengumpulan massa sebanyak-banyaknya merupakan tugas utama daripada seorang kader. Untuk pemilihan kader, disamping kader yang telah diunjuk oleh calon, ada juga yang atas permintaan sendiri untuk dijadikan sebagai kader. Meraka yang bersedia sebagai kader atas permintaannya sendiri biasanya dari jajaran keluarga dan sahabat, namun ada juga orang lain yang merasa sangat perlu dan simpati sekali kepada para calon.

Disamping kader dan pendukung utama ada juga disebut botoh yaitu penjudi yang bertaruh terhadap kemenangan sang calon. Kemenangan sang calon yang dijagokan berarti kemenangan dalam taruhan, oleh karena itu para botoh atau penjudi biasanya ikut berupaya agar calon yang dijagokannya akan menang. Dan untuk tujuan tersebut para botoh tidak segan-segan memberikan hadiah uang kepada warga yang mempunyai hak pilih. (Hasil wawancara dengan bapak Abd. Wahid, bapak Nur Hadi dan Bapak Kaseri)

Faktor terpenting dalam upaya memenangkan pemilihan, berdasarkan fakta di atas, adalah banyaknya uang karena kegiatan mobilisasi massa memerlukan biaya banyak. Hampir disetiap kegiatan/pertemuan yang diadakan memerlukan biaya. Sebagai contoh dengan mengadakan pertemuan atau jagongan tiap malam di tempat-tempat tertentu, seperti di rumah para calon, rumah para kader dan warung tertentu. Kegiatan

tersebut dimaksudkan agar para warga yang memiliki hak pilih mendukung dan memilihnya. Dan kegiatan tersebut (sebagai acara tasyakuran) diadakan sejak para calon mendaftarkan diri dan lulus sampai menjelang pelaksanaan pemilihan.

Bahkan setelah para calon tersebut dinyatakan lulus (Desa Jogosatru tanggal 2 September 1994 dan Desa Jumputrejo tanggal 23 Januari 1995) dalam ujian Kepala Desa, maka setiap malam banyak anggota masyarakat yang mengunjungi rumah para calon untuk jagongan. Mengenai hidangan makanan untuk para tamu di setiap pertemuan sudah menjadi kebiasaan di Kecamatan Sukodono. Demikian juga bagi setiap calon sebagai upaya menarik simpati adalah sudah menjadi kebiasaan pula pada setiap akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Dalam rangka pencarian pendukung, berdasarkan Petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 141/18323/012/1983 tanggal 10 Oktober 1983, perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa butir 33 yang berbunyi :

"Para calon Kepala Desa yang dalam mencari pendukung ternyata membagi-bagikan sesuatu baik berupa uang maupun barang, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa pembatalan".

Sebagai manifestasinya, ternyata apa yang dilakukan para calon dalam mencari pendukung yaitu dengan membagi-bagikan uang atau barang tidak ada yang dikenakan sanksi

Bersandar pada ketentuan diatas, yang perlu dicatat adalah diselenggarakan secara berlebih-lebihan. Jika dikaitkan dengan kenyataan yaitu dengan adanya pembagian uang adalah tidak berlebih. Dan lagi jumlah uang tersebut sudah merupakan kesepakatan dari para calon. Pembagian uang tersebut dimaksudkan sebagai 'uang sanga karena selama mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mereka tidak bekerja. Dan ini tidak ditolak oleh para pemuka agama, alasannya karena sang calon menghendaki kebaikan masyarakat untuk memilihnya. Maka pemberian uang pengganti selama tidak bekerja dirasa cukup patut. (Hasil wawancara dengan bapak H. Fatchurrahman, Bapak Rahmad Hidayat, Bapak Asy'ary dan Bapak Maallifi)



### 3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Bab VII pasal 10 sampai dengan pasal 21. Pada pasal 13 disebutkan bahwa :

1. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
2. Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya tiga hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.



Dalam pasal 5 ayat 1 UUPD (Undang-Undang Pemerintah Desa) menetapkan : Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau pernah kawin. Yang dimaksud dengan langsung : Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Umum : Pada dasarnya semua Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun atau pernah kawin, berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Dengan demikian pemilihan yang bersifat umum tersebut berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua Penduduk Desa Warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas. Bebas : Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun. Rahasia : Pemilih dijamin oleh Peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun. (Sudirwo, 1991:52)





hak pilihnya berjumlah 60 Orang. Maka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah lebih  $\frac{2}{3}$  dan dianggap sah.

Dari hasil perhitungan suara dapat dilihat bahwa :

1. Robiyanto dengan tanda gambar Kelapa memperoleh suara sebanyak 1.253 suara.
2. Ir. Soenyoto dengan tanda gambar tebu memperoleh suara sebanyak 1.061 suara.

Dengan demikian yang terpilih sebagai Kepala Desa Jumputrejo adalah Robiyanto karena memperoleh dukungan suara terbanyak. Dan demikianlah akhir dari pemilihan Kepala Desa di Desa Jumputrejo yang berjalan baik dan aman.

---ooo0ooo---









Dalam hadits lain Rasulullah menyebutkan :

الاتصال الإمارات

"Janganlah meminta jadi pemimpin"

Dengan demikian mobilisasi massa/pencarian dukungan yang dilakukan oleh para calon Kepala Desa tersebut adalah tidak menyalahi dari instruksi Menteri Dalam Negeri dan Petunjuk Gubernur. Namun Islam melarang apabila dalam membagi-bagikan uang tersebut karena ada maksud tertentu (sengaja) yaitu agar memilihnya.

### C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara demokrasi murni, yaitu hasil pemilihan diambil dari suara terbanyak. Dan juga berdasarkan peraturan-peraturan sebagaimana tersebut, yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.

Dalam Islam, peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan politik adalah penting yang merupakan prinsip dasar negara dan masyarakat muslim. Prinsip itulah yang dipakai dalam perjanjian (kontrak) imamah atau bay'ah pada masa lampau dan dapat diterapkan dalam penerapan pemungutan suara di masa kini. (Ahmad, 1994:104)



Musyawarah adalah prinsip utama dalam kepemimpinan Islam. Prinsip ini harus dipakai pada setiap interaksi sosial sebelum memutuskan masalah-maslah penting. Karena pentingnya syura ini maka menurut banyak mufasssir bahwa syura adalah wajib. Dalam Al Qur'an telah dicantumkan secara jelas diantaranya dalam surat Asy-Syura ayat 38 Allah berfirman :

وامرهم شورى بينهم ⑤

Artinya : "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". (Depag RI, 1989:789)

Adapun pemilihan aturan musyawarah diserahkan kepada rakyat yang didasarkan atas kepercayaan agama dan diri masyarakat itu sendiri. Dalam cakupan prinsip ini diserahkan kepada rakyat untuk memilih bentuk musyawarah dan kelengkapannya dengan tujuan untuk memenuhi keinginan-keinginan rakyat dan menjamin stabilitas umum, serta perse-tujuan dan kepuasan rakyat.

Sumber-sumber sejarah meriwayatkan bahwa ke empat kholifah pertama, setelah menerima bay'ah dari ahl al-ikhtiyar atau ahlul hall wal'aqd menghadiri pertemuan umum di masjid dimana ummat memberikan bay'ah kepada mereka. Al Mawardi mengatakan bahwa dalam membahas pemilihan imam, ahlul hall wal'aqd harus mempertimbangkan kemungkinan para calon yang memperoleh persetujuan sebagian besar ummat.



Al Mawardi memandang bay'ah al ikhtiyar semata-mata sebagai mencalonkan orang yang paling mampu untuk jabatan imam, sementara pengangkatan itu sendiri memerlukan keputusan ummat. (Ahmad, 1994:94)

Dari pendapat Al Mawardi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam hal pengangkatan seorang pemimpin dalam Islam adalah berdasarkan musyawarah mufakat dari rakyat dan pemilihan itu sendiri diserahkan sepenuhnya kepada rakyat.

Dengan demikian, bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di daerah penelitian tersebut adalah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---ooOoo---









## BIBLIOGRAFI

- Dawud, Sunan Abu Dawud, Indoesia : Al Maktab Al Islami, tt, Juz III.
- Ahmad Mumtaz, Teori Politik Islam, Bandung : Mizan, 1994.
- Abidin Ahmad H. Zaenal, Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghozali, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Al-Buraey A. Muhammad, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, terjemah (Administrative Development an Islamic Perspective oleh Ahmad Nasir) Jakarta : Rajawali, 1986.
- Al-Maududi Abul A'la, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, terjemah (The Islamic Law and Constution oleh Drs. Acep Hikmat), Bandung : Mizan, 1994.
- , Khilafah dan Kerajaan, terjemah (Al Khilafah wa Al Mulk oleh Muhamad Al Baqir), Bandung : Mizan, 1992.
- Azhary Muhammad Tahir, Negara Hukum, Jakarta-Indonesia : Bulan Bintang, 1992.
- Bukhori, Shahih Bukhori, Indonesia : Darul Ihya' Al Kutubi Arobiyah, tt, Juz II.
- Departemen Agama, RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya : Mahkota, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Hamidullah dkk, Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, terjemah dari tiga buku :
1. Nazhriyatul Islam As Siyaasiyah, oleh Abul A'la Muassasah ar Risalah, Beirut 1979/1399.
  2. Al Fardu wa ad Daulah fi Asy Syari'atil Islamiyah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, The Holy Koran Publishing House, 1978/1398.
  3. Al Watsaa'iq as Siyaasiyah fil 'Ahdin Nabawy, oleh Dr. Hamidullah, Dar al Irsyad , Beirut 1969/1389. Surabaya : Bina Ilmu, 1987.



